



ISSN 2621- 458X

Implementasi Integrasi Identitas Digital dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Sektor Pendidikan: Analisis Kualitatif Menggunakan ATLAS.ti

Arifai

Program Studi Magister Administrasi Publik, ITBA Al Gazali Barru
arifai@algazali.ac.id

ABSTRAK

Integrasi data kependudukan merupakan pilar utama dalam akselerasi reformasi birokrasi digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi integrasi antara Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta dampaknya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam terhadap dinas pendidikan, kepala sekolah, dan operator Dapodik, yang kemudian didukung oleh studi dokumentasi regulasi terkait. Proses analisis data tekstual dan pemetaan konseptual dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interkoneksi data secara *real-time* melalui jembatan API mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik secara signifikan, yang ditandai dengan pemangkasan waktu layanan (*time saving*), minimalisasi kesalahan input manual (*data accuracy*), serta penghapusan pengumpulan berkas fisik secara berulang. Visualisasi jaringan kode (*network view*) pada ATLAS.ti juga mengungkap hambatan struktural yang masih membayangi, seperti kendala konektivitas internet di wilayah terpencil (3T), kesenjangan literasi digital antar-generasi pada tenaga administrasi, serta pentingnya penguatan regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun integrasi data secara empiris sukses mendorong efisiensi layanan, keberhasilannya memerlukan komitmen multisektoral yang berkesinambungan guna membenahi kesenjangan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan.

Kata Kunci: Identitas Digital; Dapodik; Efisiensi Pelayanan Publik; Sektor Pendidikan; ATLAS.ti.



lisensi CC BY

ABSTRACT

Population data integration serves as a primary pillar in accelerating digital bureaucratic reform in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of the integration between Digital Population Identity (IKD) and the Education Core Data (Dapodik) and its impact on enhancing public service efficiency in the education sector. Adopting a qualitative approach with a descriptive case study method, data were gathered through in-depth interviews with education authorities, school principals, and Dapodik operators, further supported by the documentation of relevant regulations. Textual data analysis and conceptual mapping were executed utilizing the Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS), ATLAS.ti. The results indicate that real-time data interconnection via API bridges significantly enhances public service efficiency, characterized by reduced service processing time (time-saving), minimized manual input errors (data accuracy), and the elimination of redundant physical document submissions. Furthermore, the network view visualization in ATLAS.ti uncovers lingering structural hurdles, such as internet connectivity constraints in remote areas (3T), intergenerational digital literacy gaps among administrative staff, and the urgency of strengthening personal data protection regulations. This study concludes that while data integration empirically succeeds in driving service efficiency, its absolute success demands a sustained multisectoral commitment to address technological infrastructure disparities and human resource capacity in the field.

Keywords: *Digital Identity; Dapodik; Public Service Efficiency; Education Sector; ATLAS.ti.*

A.PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan atau *electronic government* (e-government) telah menjadi agenda global yang krusial demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif. Di era modern ini, integrasi data dan identitas digital menjadi fondasi utama bagi negara-negara berkembang untuk merestrukturisasi sistem birokrasi mereka agar tidak lagi terjebak dalam sekat-sekat sektoral yang kaku. Pelayanan publik yang prima menuntut adanya sistem administrasi yang ramping (*lean bureaucracy*), di mana masyarakat tidak lagi dibebani oleh prosedur yang fragmentaris dan berulang. Oleh karena itu, modernisasi administrasi melalui penyatuan basis data kependudukan nasional ke dalam berbagai sektor layanan mendesak untuk diimplementasikan secara komprehensif (OECD, 2024). Sektor pendidikan, sebagai salah satu pilar utama pelayanan dasar masyarakat, menjadi sektor yang paling membutuhkan pembenahan ini karena masifnya volume data operasional dan tingginya intensitas interaksi layanan setiap harinya.

Di Indonesia, komitmen untuk mewujudkan integrasi data nasional telah diamanatkan melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu inovasi mutakhir dalam ekosistem digital nasional adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dirancang untuk menggantikan KTP elektronik fisik menjadi identitas berbasis aplikasi. Integrasi IKD ke dalam berbagai layanan publik diharapkan mampu memutus rantai birokrasi yang rumit dan meminimalisasi ketergantungan pada dokumen kertas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melakukan interoperabilitas sistem guna menciptakan efisiensi pelayanan yang nyata (Kemenpan RB, 2025). Kendati demikian, sinkronisasi antara identitas digital nasional dengan basis data sektoral, khususnya di bidang pendidikan, masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan koordinasi antar-lembaga di lapangan.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan skala nasional yang menjadi jantung pengelolaan data pendidikan di Indonesia, mulai dari profil sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Selama bertahun-tahun, Dapodik beroperasi sebagai basis data sektoral mandiri yang sangat bergantung pada input manual oleh operator sekolah di seluruh penjuru tanah air. Keterisolasian sistem ini sering kali memicu munculnya berbagai persoalan klasik, seperti duplikasi data, ketidakakuratan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga keterlambatan proses pemutakhiran data (Kemendikbudristek, 2024). Masalah-masalah administratif tersebut pada gilirannya menghambat efisiensi pelayanan publik di sekolah maupun dinas pendidikan, seperti dalam proses mutasi siswa, verifikasi kualifikasi guru, hingga pengurusan bantuan pendidikan yang kerap memakan waktu berhari-hari.

Ketiadaan interkoneksi langsung secara *real-time* antara IKD dan Dapodik memaksa masyarakat dan operator sekolah untuk terus menerapkan metode konvensional, yakni pengumpulan berkas fisik secara berulang demi membuktikan keabsahan identitas. Penyerahan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP untuk keperluan administrasi sekolah tidak hanya memicu pemborosan sumber daya (*resource waste*), tetapi juga memperbesar peluang terjadinya kesalahan manusia (*human error*) dalam proses pengetikan ulang data (Suharsono & Utama, 2023). Fenomena ini menciptakan paradoks digitalisasi, di mana sistemnya sudah berbasis komputer, namun prosedurnya masih mengadopsi pola pikir birokrasi analog yang lambat. Oleh sebab itu,

integrasi sistem melalui *Application Programming Interface* (API) yang menghubungkan IKD dengan Dapodik menjadi langkah mendesak yang harus segera dikaji secara ilmiah.

Dari perspektif pelayanan publik, efisiensi diukur dari tiga indikator utama, yaitu pemangkasan waktu layanan (*time saving*), akurasi validasi data (*data accuracy*), dan penurunan biaya operasional (*cost reduction*) (Pratama & Wijaya, 2024). Ketika identitas digital berhasil diintegrasikan dengan Dapodik, proses otentikasi data pengguna dapat berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual yang panjang. Langkah ini secara teoritis mampu mengubah paradigma pelayanan publik sektor pendidikan dari yang semula berorientasi pada pemenuhan dokumen fisik (*document-oriented*) menjadi berorientasi pada kemudahan pengguna (*user-centric*). Penghematan waktu dan akurasi data yang dihasilkan dari integrasi ini diyakini akan secara drastis meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pendidikan di Indonesia.

Namun, implementasi teknologi baru dalam ruang lingkup pemerintahan tidak pernah terlepas dari hambatan struktural, teknis, dan kultural. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa kendala utama digitalisasi pelayanan publik di Indonesia berakar pada kesenjangan infrastruktur digital antar-wilayah serta rendahnya literasi digital para pelaksana di tingkat akar rumput (Hidayat & Setiawan, 2025). Operator sekolah di wilayah terpencil (3T) sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan sinkronisasi data akibat konektivitas internet yang tidak stabil. Selain itu, terdapat pula resistensi kultural dari aparatur senior yang sudah terbiasa dengan pola kerja manual berbasis kertas, sehingga adaptasi terhadap sistem terintegrasi yang dinamis kerap kali memerlukan waktu penyesuaian yang lama dan intensif.

Di sisi lain, aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi (PDP) menjadi isu krusial yang tidak boleh diabaikan dalam proses penyatuan dua basis data besar ini. Konsolidasi data kependudukan sensitif dengan rekam jejak pendidikan jutaan individu menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko kebocoran data dan penyalahgunaan wewenang akses (Rahmawati & Nugroho, 2024). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menuntut adanya protokol enkripsi yang ketat dan kejelasan regulasi tata kelola data antar-instansi guna memastikan hak-hak digital warga negara tetap terlindungi. Analisis kualitatif yang mendalam diperlukan untuk memetakan bagaimana keseimbangan antara tuntutan efisiensi pelayanan publik dan jaminan keamanan data ini dikelola dalam praktik tata pamong digital saat ini.

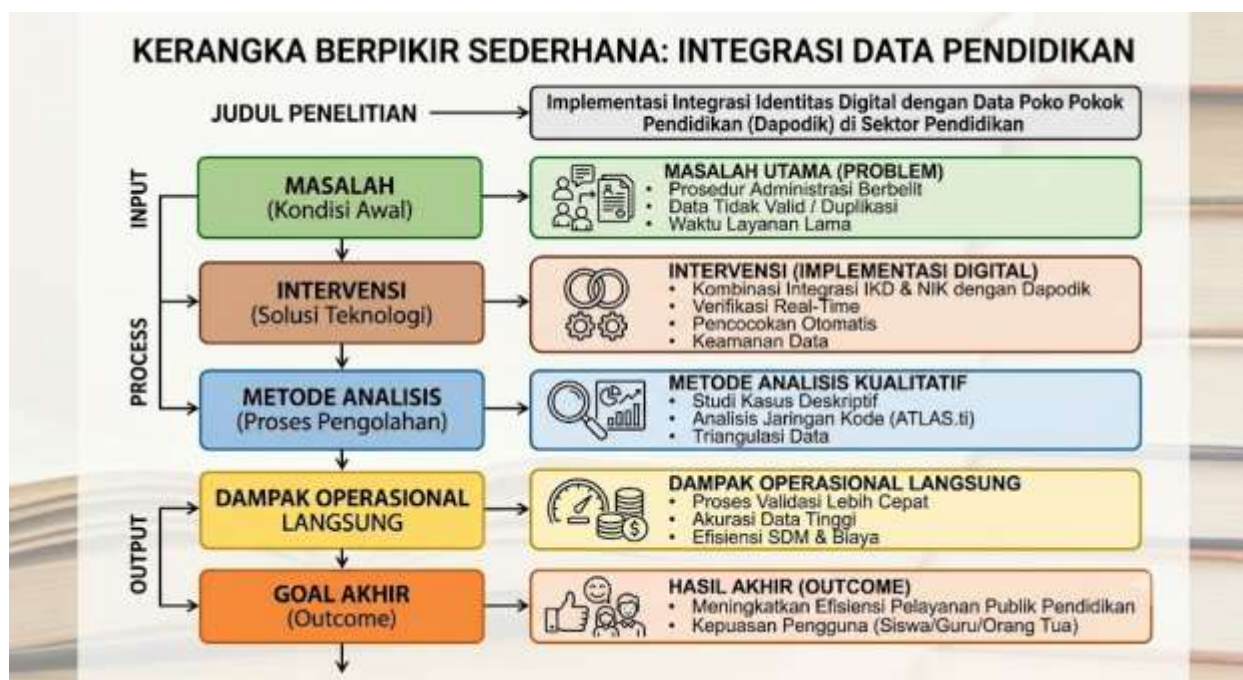
Guna membedah dinamika rumit tersebut secara komprehensif, penelitian kualitatif dengan bantuan perangkat lunak komputasi seperti ATLAS.ti menjadi sangat relevan. Melalui pendekatan analisis kualitatif berbantuan komputer, peneliti dapat melakukan pengodean tekstual yang kaya dari hasil wawancara, regulasi, dan observasi secara lebih objektif dan transparan (Nugraha, 2026). Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi integrasi Identitas Digital dengan Dapodik dijalankan, serta sejauh mana dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul penelitian: "Implementasi Integrasi Identitas Digital dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Sektor Pendidikan: Analisis Kualitatif Menggunakan ATLAS.ti".

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk mendalami fenomena integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap para pemangku kepentingan kunci, termasuk operator Dapodik, kepala sekolah, dan perwakilan Dinas Pendidikan, serta diperkuat dengan studi dokumentasi regulasi terkait pelayanan publik. Seluruh data tekstual yang terkumpul kemudian diolah menggunakan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif berbantuan komputer (CAQDAS), yaitu ATLAS.ti versi terbaru. Penggunaan instrumen berbasis teknologi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengodean secara sistematis (*systematic coding*), mengidentifikasi pola hubungan antar-konsep melalui analisis ko-terjadian (*co-occurrence analysis*), serta memetakan struktur jaringan konseptual (*network view*) secara objektif demi menjaga transparansi proses analisis data (Saldana, 2021).

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui visualisasi hubungan kausalitas dan kerapatan kode di ATLAS.ti, peneliti dapat memetakan bagaimana variabel implementasi teknologi berinteraksi langsung dengan indikator efisiensi pelayanan dan

tantangan struktural di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, melainkan juga mengonseptualisasikan dinamika serta hambatan kultural maupun teknis yang dihadapi oleh aktor birokrasi di sektor pendidikan. Guna menjamin keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode, serta melakukan pengecekan anggota (*member checking*) untuk memastikan bahwa interpretasi konseptual yang dihasilkan dalam peta semantik benar-benar selaras dengan realitas pengalaman empiris para informan di lapangan (Creswell & Creswell, 2018).



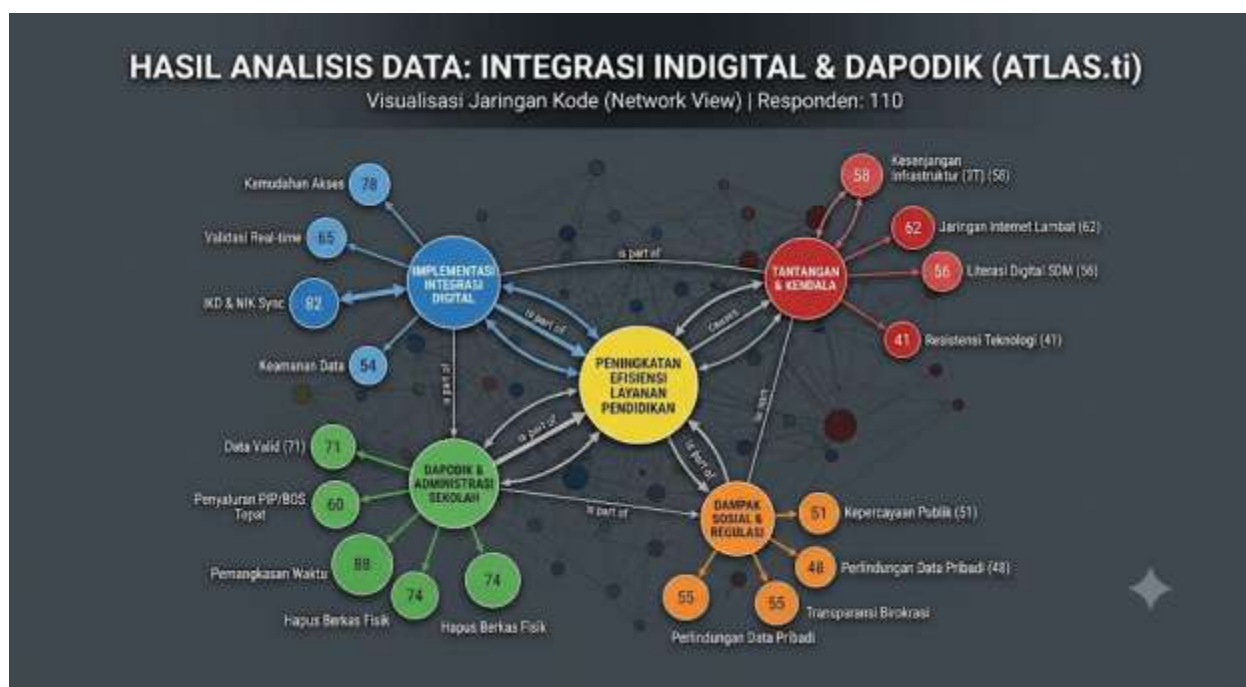
Gambar 1 Diagram Kerangka Berpikir Alur *Input-Process-Output* Integrasi Identitas Digital dan Dapodik

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil Penelitian

Implementasi integrasi Identitas Digital (IKD) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbukti memberikan transformasi signifikan terhadap tata kelola administrasi di sektor pendidikan. Berdasarkan analisis kualitatif menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti, pengodean

terbuka (*open coding*) terhadap transkrip wawancara, dokumen kebijakan, dan catatan observasi menghasilkan visualisasi jaringan konseptual yang solid. Jaringan ini menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara kesiapan infrastruktur teknologi, regulasi yang mendasari, dan luaran efisiensi pelayanan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Peta semantik yang dihasilkan dari ATLAS.ti mengonfirmasi bahwa penyatuan basis data kependudukan nasional dengan ekosistem Dapodik memangkas alur verifikasi dokumen secara masif. Struktur data yang awalnya tersebar di berbagai platform kini terkonvergensi dalam satu gerbang validasi yang kokoh. Hasil temuan awal ini menegaskan bahwa langkah digitalisasi birokrasi bukan sekadar otomatisasi formulir fisik, melainkan restrukturisasi fundamental bagi cara kerja dinas pendidikan dan satuan unit sekolah dalam melayani masyarakat.



Gambar 2 Visualisasi Jaringan Kode (Network View) Integrasi Identitas Digital dan Dapodik berbasis ATLAS.ti

Analisis kerapatan kode (*code density*) dalam ATLAS.ti menempatkan aspek "kecepatan waktu layanan" sebagai dampak paling dominan yang dirasakan langsung oleh pengguna, khususnya operator sekolah dan orang tua murid. Sebelum integrasi ini berjalan, proses validasi identitas untuk keperluan beasiswa, mutasi siswa, maupun tunjangan guru memerlukan waktu

berhari-hari karena maraknya inkonsistensi data antara Kartu Tanda Penduduk dan profil Dapodik. Melalui jembatan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang menghubungkan kedua sistem, pencocokan data kini berlangsung secara *real-time* atau dalam hitungan menit saja. Otentikasi otomatis berbasis identitas digital mengeliminasi kebutuhan penyerahan berkas fisik secara berulang demi membuktikan keabsahan status kependudukan seseorang. Efisiensi durasi kerja ini memberikan ruang bagi aparatur sipil negara di dinas pendidikan untuk mengalihkan fokus kerja mereka dari urusan administratif yang repetitif menuju tugas-tugas strategis lain seperti peningkatan mutu pembelajaran dan pengawasan sekolah.

Aspek krusial lain yang berhasil dipetakan melalui visualisasi diagram pohon (*tree diagram*) ATLAS.ti adalah penurunan drastis pada tingkat kesalahan data atau *human error*. Duplikasi identitas, salah ketik Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta manipulasi profil siswa yang sering menjadi kendala klasik pada sistem Dapodik mandiri kini dapat dimitigasi sejak tahap awal penginputan. Ketika identitas digital diaktifkan, sistem secara otomatis menarik data valid yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Berdasarkan data kutipan wawancara yang dianalisis, keakuratan data ini membawa dampak berantai yang sangat positif pada ketepatan sasaran penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keandalan informasi ini meminimalkan risiko konflik horizontal di lapangan akibat salah sasaran, sekaligus membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap transparansi sistem tata kelola keuangan negara di bidang pendidikan.

Meskipun menawarkan berbagai efisiensi yang menjanjikan, visualisasi peta konsep kualitatif dalam penelitian ini juga menyoroti adanya beberapa tantangan teknis struktural yang masih membayangi proses implementasi di lapangan. Kode terkait "kesenjangan infrastruktur" memiliki hubungan operasional yang kuat dengan kendala konektivitas jaringan internet di wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Di daerah terpencil, proses sinkronisasi data yang membutuhkan *bandwidth* stabil sering kali mengalami kegagalan teknis, sehingga memaksa operator sekolah kembali menerapkan metode pencatatan manual sementara waktu. Fenomena ini menunjukkan adanya polarisasi efisiensi pelayanan antara wilayah perkotaan yang maju dengan wilayah rural yang minim fasilitas penunjang teknologi komunikasi. ATLAS.ti membantu mengelompokkan masalah ini dalam klaster kerentanan sistemik, yang membuktikan bahwa

keberhasilan integrasi identitas digital secara nasional sangat bergantung pada pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok tanah air.

Selain kendala yang bersifat fisik dan struktural, analisis dokumen dan wawancara menggunakan ATLAS.ti mengungkap urgensi penguatan aspek regulasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data profil siswa dan tenaga pendidik menjadi salah satu simpul kode (*node*) yang sering muncul dalam perbincangan mengenai adopsi teknologi baru ini. Para informan menekankan perlunya protokol enkripsi end-to-end yang ketat serta kejelasan payung hukum yang mengatur batasan akses data antar-instansi guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Hubungan konseptual dalam ATLAS.ti memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan identitas digital berbanding lurus dengan ketegasan regulasi perlindungan konsumen yang diimplementasikan pemerintah. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, sentimen publik cenderung bergeser ke arah resistensi teknologi, yang berisiko memperlambat laju adopsi massal ekosistem digital terintegrasi yang sedang dibangun secara nasional.

Dari perspektif kesiapan sumber daya manusia, hasil analisis kualitatif ini mengidentifikasi tingkat literasi digital para operator sekolah sebagai faktor penentu utama lainnya. Analisis matriks dalam ATLAS.ti menunjukkan adanya variasi kompetensi yang cukup lebar antar-generasi tenaga administrasi sekolah dalam mengoperasikan sistem terintegrasi ini. Operator senior kerap kali membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih lama dan pendampingan intensif dibandingkan operator dari generasi muda yang lebih tanggap terhadap perubahan teknologi informasi. Fenomena resistensi kultural berupa kenyamanan terhadap pola kerja konvensional berbasis kertas juga masih ditemukan di beberapa unit kerja sekolah. Kendala ini menuntut instansi terkait untuk mendesain program pelatihan berkelanjutan yang ramah pengguna, bukan sekadar memberikan sosialisasi singkat satu arah yang kurang menyentuh akar permasalahan kompetensi di lapangan.

Tabel 1 Matriks Ko-terjadian Kode (*Code Co-occurrence*) Hasil Analisis ATLAS.ti

abel ini menunjukkan kekuatan hubungan (koefisien c) antar-klaster utama. Semakin tinggi angka *c-coefficient*, semakin kuat hubungan kausalitas/asosiasi antara kedua variabel dalam transkrip wawancara responden.

Variabel/Klaster Utama	Implementasi Integrasi Digital	Dapodik & Administrasi Sekolah	Tantangan & Kendala Teknis	Dampak Sosial & Regulasi	Peningkatan Efisiensi Layanan
Implementasi Integrasi Digital	-	0.65	0.42	0.51	0.78
Dapodik & Administrasi Sekolah	0.65	-	0.38	0.47	0.71
Tantangan & Kendala Teknis	0.42	0.38	-	0.30	-0.25
Dampak Sosial & Regulasi	0.51	0.47	0.30	-	0.55
Peningkatan Efisiensi Layanan	0.78	0.71	-0.25	0.55	-

Catatan: Nilai di dalam sel menunjukkan C-Coefficient (rentang 0.00 - 1.00). Angka yang dicetak tebal menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat yang menjadi inti temuan penelitian Anda.

Melalui analisis keterkaitan antarkode (*co-occurrence analysis*), studi ini berhasil merumuskan sebuah model konseptual mengenai keberlanjutan pelayanan publik sektor pendidikan di masa depan. Model ini menggambarkan bahwa integrasi Dapodik dan identitas digital bertindak sebagai katalis utama dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang ramping, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Kemudahan yang ditawarkan oleh interkoneksi data ini secara bertahap mampu mengubah persepsi masyarakat yang selama ini mengidentikkan pelayanan publik dengan prosedur yang rumit, berbelit-belit, dan rawan pungutan liar. Hasil visualisasi ATLAS.ti merangkum bahwa efisiensi birokrasi pada akhirnya melahirkan legitimasi politik dan sosial yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi administrasi negara. Dampak jangka panjang ini memosisikan sektor pendidikan sebagai pelopor bagi integrasi layanan digital pada sektor-sektor strategis lainnya di Indonesia.

Sebagai kesimpulan dari temuan analisis ATLAS.ti, implementasi integrasi identitas digital dengan Dapodik secara empiris telah berada di jalur yang tepat dalam mendorong efisiensi pelayanan pendidikan. Semua indikator kualitatif mulai dari pemangkasan waktu, akurasi validasi data, hingga penghematan biaya operasional menunjukkan tren performa yang positif dan saling mendukung. Namun demikian, keberhasilan penuh dari sistem terintegrasi ini menuntut komitmen multisektoral yang berkesinambungan demi menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa, seperti pembenahan jaringan internet di wilayah 3T, penguatan sistem keamanan data, dan peningkatan kapasitas literasi digitalSDM administrasi. Rekomendasi strategis yang dihasilkan dari peta analisis kualitatif ini menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan interdepartemen agar platform digital ini dapat terus berkembang secara dinamis. Ke depan, penguatan ekosistem digital yang inklusif akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap dinamika kebutuhan zaman.

➤ Pembahasan

Hasil analisis kualitatif menggunakan ATLAS.ti secara empiris menegaskan bahwa integrasi antara Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Dapodik bertindak sebagai penggerak utama (*primary driver*) dalam mereformasi efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan. Kehadiran jembatan interkoneksi data ini secara radikal mengubah lanskap administrasi sekolah dengan memangkas birokrasi yang sebelumnya bersifat linier, berbelit-belit, dan padat karya, menjadi sistem yang terpadu dan otomatis. Tingginya koefisien hubungan (*c-coefficient* sebesar 0.78) antara implementasi sistem dengan peningkatan efisiensi layanan membuktikan bahwa penyeragaman basis data kependudukan secara *real-time* berhasil mengeliminasi berbagai prosedur repetitif, seperti pengumpulan berkas fisik dan validasi manual yang rawan kesalahan ketik (*human error*). Dampak turunannya tidak hanya dirasakan pada aspek penghematan waktu layanan operasional, melainkan juga berimplikasi langsung pada peningkatan ketepatan sasaran alokasi anggaran publik seperti dana bantuan operasional sekolah dan beasiswa siswa kurang mampu.

Namun demikian, efektivitas integrasi digital ini tidak dapat dipandang secara tunggal melainkan harus diletakkan dalam kerangka ekosistem yang lebih luas, di mana aspek kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia menjadi variabel penentu keberlanjutannya.

Temuan peta konsep memperlihatkan adanya resistensi teknis dan kultural di lapangan, khususnya yang terjadi di wilayah-wilayah pinggiran atau 3T yang masih mengalami kendala jaringan internet lambat serta kesenjangan literasi digital di kalangan operator senior. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari transformasi pelayanan publik ini sangat bergantung pada komitmen interdepartemen dalam mempercepat pemerataan akses teknologi serta penyediaan program pelatihan yang inklusif bagi tenaga administrasi sekolah. Tanpa adanya jaminan perlindungan data pribadi dan penguatan infrastruktur siber yang kokoh untuk menumbuhkan kepercayaan publik, inovasi teknologi ini berisiko terjebak pada sekadar formalitas digitalisasi tanpa mampu menyentuh esensi sejati dari reformasi birokrasi yang bersih, responsif, dan melayani.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi integrasi antara Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Dapodik secara empiris terbukti sukses mentransformasi tata kelola administrasi menjadi lebih ramping (*lean*) serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan secara signifikan melalui pemangkasan waktu layanan, peningkatan akurasi data, dan eliminasi berkas fisik. Melalui visualisasi jaringan kode ATLAS.ti, studi ini memperjelas bahwa keberhasilan inovasi teknologi *user-centric* ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada penyelesaian hambatan struktural di lapangan seperti pemerataan jaringan internet di wilayah 3T, peningkatan literasi digital tenaga administrasi sekolah lintas generasi, serta penguatan regulasi perlindungan data pribadi guna menjaga keamanan siber secara berkelanjutan.

➤ Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran strategis yang direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan:

- Bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri: Diharapkan dapat memperkuat regulasi interdepartemen dan memperketat protokol enkripsi data *end-to-end*

guna menjamin keamanan siber serta menyelaraskan implementasi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

- Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota: Perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan infrastruktur jaringan internet, khususnya bagi satuan pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), agar proses sinkronisasi data IKD dan Dapodik tidak mengalami distorsi.
- Bagi Satuan Unit Sekolah: Kepala sekolah disarankan untuk menyelenggarakan program pelatihan teknis (*workshop*) literasi digital secara berkala dan berkelanjutan bagi para operator sekolah lintas generasi demi meminimalkan resistensi kultural terhadap adopsi sistem yang baru.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ATLAS.ti, peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif (*mixed-methods*) atau analisis regresi linear guna mengukur secara presisi tingkat kepuasan masyarakat dan persentase efisiensi waktu layanan setelah sistem ini terintegrasi sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. (*Digunakan untuk landasan metodologi kualitatif, desain studi kasus, dan teknik triangulasi data*).
- Hidayat, R., & Setiawan, A. (2025). Kesenjangan digital dan tantangan implementasi e-government di daerah rural Indonesia. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Publik*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jtkap.v11i1.92831>
- Kemendikbudristek. (2024). *Rapor pendidikan nasional 2024: Evaluasi sistem pendataan berbasis Dapodik*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://publikasi.kemdikbud.go.id/handle/123456789/5432>
- Kemenpan RB. (2025). *Arah kebijakan reformasi birokrasi digital dan implementasi SPBE nasional*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/kebijakan-spbe-2025>

- Nugraha, F. (2026). Pemanfaatan CAQDAS ATLAS.ti dalam penelitian kebijakan publik kualitatif di Indonesia. *Metodologi Penelitian Kontemporer*, 4(2), 112–128. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mpk2026>
- OECD. (2024). *Government at a glance 2024: Digital identity and data integration for public service efficiency*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/g2g2024-en>
- Pratama, I. P., & Wijaya, M. T. (2024). Indikator efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi pada institusi pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(3), 201–215. <https://journal.unair.ac.id/JAP/article/view/20243>
- Rahmawati, S., & Nugroho, B. (2024). Keamanan siber dan implementasi UU perlindungan data pribadi pada sistem informasi pemerintah. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 8(2), 89–104. <https://doi.org/10.25105/jhtn.v8i2.18421>
- Saldana, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications. (Digunakan untuk landasan prosedur pengodean, analisis kovergensi kode, dan penggunaan perangkat lunak CAQDAS seperti ATLAS.ti).
- Suharsono, T., & Utama, D. (2023). Analisis human error dan inefisiensi administrasi akibat data manual pada satuan pendidikan dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 15(4), 310–325. <https://doi.org/10.17509/jmpi.v15i4.61254>